

KONFLIK LAHAN DI REMPANG DALAM PANDANGAN ANALISIS WACANA KRITIS MODEL MICHEL FOUCAULT

Klemens Maksianus Lenga¹, Hari Bakti Mardikantoro², Rustono³

¹Universitas Negeri Semarang, lengaklemens@gmail.com

²Universitas Negeri Semarang, haribaktim@gmail.com

³Universitas Negeri Semarang, rus_tono58@yahoo.co.id

ABSTRAK

Wacana tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa tetapi bahasa sebagai alat yang digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk praktik ideologi dan kekuasaan. Analisis wacana kritis memahami wacana tidak semata-mata sebagai suatu studi bahasa, tetapi analisis wacana kritis juga menghubungkannya dengan konteks. Analisis wacana model Michel Foucault merupakan salah satu metode analisis teks media untuk membedah bagaimana cara media mengkonstruksi sebuah wacana. Tujuan penelitian ini yakni mengkaji bentuk representasi; misrepresentasi marjinalisasi, dan delegitimasi dalam wacana berita tentang konflik lahan di Pulau Rempang, Batam yang diberitakan media online Kompas.com dan CNN Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik catat sedangkan dianalisis data dengan teknik analisis konten. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa berita “*Konflik Lahan di Rempang Meruncing, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Warga*” dan “*Polemik Status Tanah Rempang Batam yang Bakal Disulap PSN Eco-City*” mengandung bentuk representasi; misrepresentasi, marjinalisasi, dan delegitimasi.

Kata Kunci: Konflik Rempang, Analisis Wacana Kritis, Michel Foucault

How To Cite: Lenga, K. M., Mardikantoro, H. B., & Rustono. (2024). KONFLIK LAHAN DI REMPANG DALAM PANDANGAN ANALISIS WACANA KRITIS MODEL MICHEL FOUCAULT. *Bahtera Indonesia; Jurnal Penelitian Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 9(1), 332–346. <https://doi.org/10.31943/bi.v9i1.653>

DOI: <https://doi.org/10.31943/bi.v9i1.653>

PENDAHULUAN

Analisis wacana kritis dilakukan untuk memahami maksud atau makna yang tersembunyi di balik teks-teks berita. Pemahaman dasar analisis wacana kritis adalah wacana tidak dipahami semata-mata sebagai objek studi bahasa tetapi bahasa

sebagai alat yang digunakan untuk tujuan dan praktik tertentu termasuk praktik ideologi dan kekuasaan. Jadi, analisis wacana kritis memandang media sebagai salah satu ‘ladang’ yang digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk

memperjuangkan kelompoknya dan memarginalkan kelompok lain (Sari, 2014).

Menurut paham analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis*), teks bukanlah sesuatu yang bebas nilai dan menggambarkan realitas sebagaimana adanya. Kecenderungan pribadi dari sang produsen teks dan struktur sosial yang melingkupi sang produsen teks ikut mewarnai isi teks. Bahasa tidak netral melainkan membawa pesan ideologi tertentu yang dipengaruhi oleh sang pembuat teks (Fauzan, 2014). Analisis wacana kritis memahami wacana tidak semata-mata sebagai suatu studi bahasa, tetapi analisis wacana kritis juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks yang dimaksud adalah konteks praktik kekuasaan yang bertujuan untuk memarginalkan individu atau kelompok tertentu.

Beberapa tokoh linguistik kritis, seperti Fowler (1986), Fairclough (1989; 1995), van Dijk (1985; 1993; 2001), dan Wodak (2001; 2007) memandang bahwa fenomena komunikasi dan interaksi yang “nyata” lebih banyak diwarnai oleh adanya fenomena-fenomena ketidakteraturan, kesenjangan, ketidakseimbangan, perekrayaan, dan ketidaknetralan dari isu-isu ketidakadilan dalam gender, politik, ras, media massa, kekuasaan, dan komunikasi lintas budaya. Dengan demikian,

menganalisis kata, frasa, kalimat, dan teks yang dihasilkan oleh seorang tokoh dapat mengungkap persoalan-persoalan yang lebih besar dan mendasar.

Analisis wacana kritis amat relevan digunakan untuk menganalisis fenomena komunikasi yang penuh dengan kesenjangan, yakni adanya ketidaksetaraan relasi antarpartisipan, seperti komunikasi dalam politik, relasi antara atasan-bawahan, komunikasi dalam wacana media massa, serta relasi antara laki-laki dan perempuan dalam politik gender (Fauzan, 2014). Meskipun ada banyak aliran dalam paradigma ini, semuanya memandang bahwa bahasa bukan merupakan medium yang netral dari ideologi, kepentingan dan jejaring kekuasaan. Karena itu, analisis wacana kritis perlu dikembangkan dan digunakan sebagai piranti untuk membongkar kepentingan, ideologi, dan praktik kuasa dalam kegiatan berbahasa dan berwacana.

Memahami analisis wacana tidak hanya memahami bahasa sebagai mekanisme internal dari linguistik semata, melainkan juga hendaknya melihat unsur di luar bahasa. Guy Cook (dalam Sobur, 2009:56) mengatakan bahwa wacana meliputi teks dan konteks. Teks merupakan semua bentuk bahasa, bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, tetapi juga semua jenis ekspresi komunikasi,

ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan memengaruhi pemakaian bahasa, seperti partisipan dalam bahasa, situasi dimana teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya (Rahmawati, 2016). Adapun wacana di sini, kemudian dimaknai sebagai teks dan konteks. Eriyanto (2001:8) melihat bahwa titik perhatian analisis wacana ialah menggambarkan teks dan konteks secara bersama-sama dalam suatu proses komunikasi (Fauzan, 2014). Di sini, dibutuhkan tidak hanya proses kognisi dalam arti umum, tetapi juga gambaran spesifik dari budaya yang dibawa. Studi mengenai bahasa ini memasukkan konteks, karena bahasa selalu berada dalam konteks dan tidak ada tindakan komunikasi tanpa partisipasi, interaksi, situasi, dan sebagainya.

Analisis wacana model Michel Foucault merupakan salah satu metode analisis teks media untuk membedah bagaimana cara media mengkonstruksi sebuah wacana. Analisis wacana menekankan pada konstelasi kekuatan yang terjadi pada proses produksi dan reproduksi makna. Analisis wacana melihat pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai praktik sosial (Halwati, 2013). Bahasa dianalisis bukan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan konteks. Konteks di sini

berarti bahasa dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu. Analisis wacana Foucault mencakup unsur: (1) Representasi; (2) Misrepresentasi: ekskomunikasi dan eksklusivitas; (3) Marjinalisasi: eufemisme, disfemisme, labelisasi, dan stereotip; dan (4) Delegitimasi (Rustono dan Mardikantoro, 2023).

Dalam analisis wacana pendekatan Foucault, kuasa tidak dimaknai dalam term “kepemilikan”, di mana seseorang mempunyai sumber kekuasaan tertentu. Kuasa menurut Foucault tidak dimiliki tetapi dipraktikkan dalam suatu ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain (Amin et al., 2019). Bagi Foucault, kekuasaan selalu teraktualisasikan lewat pengetahuan, dan pengetahuan selalu mempunyai efek kuasa. Penyelenggara kekuasaan menurut Foucault, selalu memproduksi pengetahuan sebagai basis kekuasaannya. Pengetahuan tidak merupakan pengungkapan samar-samar dari relasi kuasa, tetapi pengetahuan berada di dalam relasi-relasi kuasa itu sendiri. Tidak ada pengetahuan tanpa kuasa, dan sebaliknya tidak ada kuasa tanpa pengetahuan (Eriyanto, 2005:65-66).

Salah satu alat pemberitaan terpenting dalam memberitakan suatu peristiwa adalah media massa baik cetak maupun elektronik. Lewat pemberitaan yang terus menerus disebarkan, media

secara langsung membentuk pemahaman dan kekuasaan di kepala khalayak mengenai sesuatu. Wacana yang dibuat oleh media itu bisa jadi melegitimasi suatu hal atau kelompok dan medelegitimasi dan memarjinalkan kelompok lain (Sari, 2014).

Sejatinya suatu berita patut diangkat selain karena mengandung unsur *news value*, salah satu yang dianggap penting adalah jika kekuasaan politik dan kekuasaan media bersatu atau bersinergis (Iskandar dan Rini, 2016). Sedang kalangan kritis beranggapan bahwa berita bukanlah sekedar subjektivitas dari si pembuat berita, melainkan ada suatu kekuatan dominan yang memengaruhi konstruksinya (Suryawati & Jamalullail, 2021). Ternyata media bukanlah entitas yang netral, tetapi bisa dikuasai oleh kelompok dominan (Eriyanto, 2001).

Belum lama ini media-media elektronik ramai memberitakan tentang penolakan warga Rempang Batam Provinsi Kepulauan Riau atas rencana pengusuran permukiman warga untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City. Pembangunan kawasan industri Pulau Rempang, Kota Batam menimbulkan konflik sengketa tanah antara masyarakat, pemerintah, dan PT. Makmur Elok Graha. Program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia terhadap Singapura tersebut justru berujung

bentrok akibat ketidakpastian hukum atas tanah. Pemberitaan di berbagai media mengabarkan terjadi konflik agraria di Rempang dan penolakan warga Rempang direlokasi dari pemukimannya. Konflik agraria merupakan akibat dari praktik penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya dalam skala besar (Safitri & Hamid, 2023). Penyebabnya adalah adanya perlawanan masyarakat karena kehidupan yang mengalami kemerosotan akibat dari terputusnya hubungan mereka dengan sasaran produksi (Hamid & Susilowati, 2020). Hal tersebut tidak terlepas dari adanya ketimpangan-ketimpangan dalam pengelolaan dan penguasaan tanah serta sumber-sumber agraria lainnya.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik melakukan analisis wacana kritis dengan mengkaji bentuk representasi; misrepresentasi berupa ekskomunikasi dan eksklusivitas; unsur marjinalisasi berupa eufemisme, disfemisme, labelisasi, dan stereotip; serta delegitimasi dalam berita dengan judul “Konflik Lahan di Rempang Meruncing, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Warga” yang dimuat di media elektronik Kompas.com dan “Polemik Status Tanah Rempang Batam yang Bakal Disulap PSN Eco-City” yang dimuat di CNN-Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan ancangan analisis wacana kritis yang menggunakan metode konten analisis atau *content analysis* (Mulyana 2005: 82). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua buah teks berita yang bersumber dari media elektronik yakni Kompas.com dan CNN-Indonesia yang berjudul “Konflik Lahan di Rempang Meruncing, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Warga” dan “Polemik Status Tanah Rempang Batam yang Bakal Disulap PSN Eco-City”.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik catat dari sumber data tersebut yang dilakukan dengan menggunakan instrumen lembar pedoman pencatatan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik analisis konten untuk mencapai tujuan analisis, yaitu mendeskripsikan bentuk representasi, misrepresentasi, marjinalisasi, dan delegitimasi dalam teks wacana berita dengan menggunakan model analisis wacana Foucault.

HASIL DAN PEMBEHASAN

Pemberitaan konflik lahan di Rempang pada media online Kompas.com dan CNN Indonesia dapat dianalisis menggunakan

model kajian Michel Foucault dengan mengkaji unsur representasi, misrepresentasi, marjinalisasi, dan delegitimasi.

Analisis Berita 1

Judul: Konflik Lahan di Rempang Meruncing, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Warga

Media online: Kompas.com

1. Representasi

Representasi menunjuk bagaimana seseorang, kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan dalam pemberitaan. Representasi, ditampilkan sebagaimana mestinya atau diburukkan dengan kata, kalimat, aksentuasi dan bantuan foto macam apa seseorang, kelompok atau gagasan ditampilkan dalam pemberitaan kepada khalayak. Melalui bahasa, representasi atau misrepresentasi ditampilkan oleh media (Rustono dan Mardikantoro, 2023). Representasi dalam berita tersebut pada kutipan berikut ini:

Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Muhammad Syuzairi, mengatakan, warga yang menolak relokasi adalah masyarakat di 16 titik kampung tua atau permukiman orang Melayu. Warga asli diyakini telah bermukim di pulau itu setidaknya sejak 1834.

"Sejak awal sudah jelas warga Rempang tidak mau digusur karena ini menyangkut marwah. Mereka tidak mau identitas dan jati dirinya sebagai orang Melayu pesisir hilang," ujarnya.

Pada kutipan teks tersebut dijelaskan bahwa warga Rempang menolak relokasi karena hal ini berkaitan dengan identitas dan jati dirinya sebagai orang melayu. Identitas merupakan ciri-ciri atau tanda yang melekat pada seseorang yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan jati diri adalah sesuatu hal yang ada dalam diri seseorang yang meliputi karakter, sifat, watak dan kepribadiannya. Berdasarkan pernyataan tersebut penulis menampilkan sisi budaya sebagai alasan penolakan warga atas rencana relokasi.

Pernyataan "identitas dan jati diri sebagai orang melayu" sebagai bentuk representasi yang ditampilkan apa adanya, bermaksud menekankan pada pembaca bahwa warga Rempang adalah warga asli suku melayu yang sudah lama menetap di pulau Rempang, dan warga adalah pemilik kawasan Rempang yang sesungguhnya. Hal ini dipertegas dengan pernyataan bahwa warga rempang adalah warga asli yang telah bermukim di pulau itu sejak tahun 1834. Artinya bahwa sudah lebih dari setatus tahun warga menetap di "kampung tua" tersebut, dan merekalah pemilik atau penguasa atas pulau itu. Untuk itu, Pemerintah ataupun

pihak-pihak manapun yang akan melakukan pengembangan kawasan industri di lokasi tersebut harus menghargai keberadaan masyarakat Rempang serta kearifan lokal masyarakat melayu sebagai identitas dan jati diri masyarakat setempat. Merelokasi warga ke pemukiman baru dikhawatirkan akan menggeser identitas dan jati diri warga dan budaya melayu yang telah tertata dalam kehidupan sosial masyarakat Rempang.

2. Misrepresentasi

Misrepresentasi merupakan ketidakbenaran penggambaran, kesalahan penggambaran. Seseorang, kelompok, pendapat, gagasan tidak ditampilkan sebagaimana mestinya tetapi digambarkan secara buruk (Rustono dan Mardikantoro, 2023). Misrepresentasi dalam wacana berita "Konflik Lahan di Rempang Meruncing, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Warga," ditampilkan pada pernyataan berikut.

Belakangan, pemerintah menuding warga Rempang tinggal secara ilegal karena status lahan di sana adalah hutan produksi konversi (HPK). Padahal, warga Melayu telah bermukim di pulau itu jauh sebelum Indonesia merdeka.

Syuzairi menilai sikap pemerintah itu membuat konflik di Rempang semakin meruncing. Menurut dia, pemerintah tidak berhak menyatakan warga tinggal

secara ilegal karena tidak ada keputusan pengadilan terkait hal itu.

Pada kutipan wacana tersebut pemerintah menuding bahwa warga Rempang menetap atau tinggal secara ilegal di pulau Rempang. Pernyataan “warga Rempang tinggal secara illegal” ini bertolak belakang dengan pengakuan warga bahwa mereka telah mendiami kawasan tersebut dari tahun 1834, jauh sebelum Indonesia merdeka. Warga rempang yang telah lama mendiami wilayah tersebut dianggap sebagai warga ilegal karena status lahan adalah Hutan Produksi Konversi (HPK). Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa pemerintah berencana mengambil alih lahan yang telah didiami warga selama lebih dari seratus tahun itu. Dan warga Rempang seolah-olah dianggap sebagai warga ilegal dan bukan pemilik atas lahan yang akan dikembangkan sebagai kawasan Rempang Eco City tersebut. Anggapan pemerintah atas warga Rempang inilah yang mengakibatkan terjadinya konflik di Rempang. Warga rempang merasa hak-haknya sebagai pemilik lahan tidak dihargai oleh pemerintah dan adanya upaya penguasaan lahan secara paksa oleh pemerintah tanpa membangun komunikasi yang intensif dengan warga Rempang.

3. Marjinalisasi

Marjinalisasi merupakan penggambaran buruk kepada pihak/ kelompok lain tetapi tidak terjadi pemilahan antara pihak kita dengan pihak mereka. Beberapa penggunaan bahasa sebagai strategi wacana dari marjinalisasi, yaitu (1) Eufemisme: masyarakat dominan; (2) Disfemisme: masyarakat bawah; (3) Labelisasi: perangkat bahasa yang digunakan oleh kelompok di kelas atas untuk menundukkan lawan-lawannya, misal petani: penggarap liar; (4) Stereotip: penyamaan sebuah kata yang menunjukkan sifat-sifat negatif atau positif (umumnya negatif) dengan orang, kelas atau perangkat tindakan. (Rustono dan Mardikantoro, 2023). Marjinalisasi dalam wacana “Konflik Lahan di Rempang Meruncing, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Warga,” terdapat pada kutipan berikut.

Syuzairi menilai sikap pemerintah itu membuat konflik di Rempang semakin meruncing. Menurut dia, pemerintah tidak berhak menyatakan warga tinggal secara ilegal karena tidak ada keputusan pengadilan terkait hal itu.

Marjinalisasi berupa labelisasi terhadap warga dilakukan dengan cara menyebut warga Rempang tinggal secara ilegal di lahan yang akan dijadikan pengembangan proyek Eco City. Pilihan kata “ilegal” diungkapkan oleh pemerintah seakan-akan melabeli masyarakat Rempang yang mendiami kawasan yang akan dibangun

proyek strategis nasional tersebut. Diksi “illegal” ini dapat menimbulkan ketersinggungan atau merendahkan martabat warga Rempang yang sudah lama menetap di Pulau Rempang.

Selanjutnya marjinalisasi dalam wacana tersebut berupa disfemisme. Garner (2000) menyatakan bahwa disfemisme adalah mengganti kata-kata atau frase yang bermakna netral atau positif dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Penggunaan disfemisme terdapat dalam kutipan berikut ini.

Luas total 16 titik kampung tua itu tidak sampai 10 persen dari luas Pulau Rempang yang mencapai 17.000 hektar. Syuzairi menilai, seharusnya pembangunan kawasan investasi terpadu tetap dapat dilakukan tanpa menggusur warga.

Penggunaan kata “menggusur” pada kutipan pernyataan tersebut digunakan untuk menggantikan istilah relokasi. Kata menggusur memberi efek makna negatif apalagi yang digusur ini adalah warga rempang yang telah lama menetap di lokasi tersebut. Makna kata menggusur adalah menjadikan (membuat, menyuruh) pindah tempat atau menggeser tempat. Untuk itu kata menggusur lebih tepat digunakan untuk memindahkan benda mati berupa bangunan atau benda lainnya. Ketika kata menggusur ini digunakan sebagai istilah dalam

memindahkan warga Rempang maka makna yang dihasilkan berkonotasi negatif.

4. Delegitimasi

Delegitimasi merupakan bagaimana seseorang atau kelompok dianggap tidak sah (membatalkan, dianggap tidak sah). Misalnya berita penggusuran pemukiman di bantaran kali. Masing-masing pihak diwacanakan sebagai pihak yang benar (Rustono dan Mardikantoro, 2023). Delegitimasi berhubungan dengan bagaimana seseorang atau suatu kelompok dianggap tidak absah. Praktik delegitimasi itu menekankan bahwa hanya kelompok sendiri (kami) yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, tidak layak, dan tidak absah. Dengan cara apa? Umumnya dilakukan dengan otoritas dari seseorang, apakah itu intelektual, ahli tertentu, atau pejabat. Otoritas itu menekankan bahwa hanya mereka yang layak bicara, merasa absah, dan punya otoritas intelektual tertentu, Farrel (dalam Eriyanto, 2001).

Delegasi dalam wacana “Konflik Lahan di Rempang Meruncing, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Warga,” terdapat pada kutipan berikut.

Pada 13 Agustus, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, meninjau rencana pengembangan Pulau Rempang. Dalam kunjungan itu Bahlil juga sempat berdialog dengan warga.

"Saya mengerti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Namun, saya mohon masyarakat juga mengerti apa yang menjadi tujuan negara," katanya lewat pernyataan tertulis.

Delegitimasi dalam kutipan wacana di atas dimana menteri inventasi Bahlil Lahadalia yang merupakan otoritas dari pemerintah meminta warga Rempang untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Negara. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan negara lebih penting dari pada hak-hak warga Rempang yang telah lama tinggal di kawasan tersebut. Otoritas yang merupakan bentuk delegitimasi ditunjukkan dengan meminta warga Rempang memahami tujuan negara yakni untuk kepentingan pengembangan kawasan *Eco City* dan upaya relokasi warga Rempang ke lokasi baru yang telah disiapkan pemerintah.

Analisis berita 2

Judul: Polemik Status Tanah Rempang
Batam yang Bakal Disulap PSN Eco-City
Media online: CNN Indonesia

1. Representasi

Istilah representasi menunjuk pada bagaimana seseorang, kelompok, atau gagasan tertentu ditampilkan dalam pembicaraan. Dalam konteks media massa, pembicaraan adalah berita yang hadir dalam bentuk bahasa (Muttaqin, 2012). Representasi pada wacana berita berjudul

"Polemik Status Tanah Rempang Batam yang Bakal Disulap PSN Eco-City" yang dimuat di media CNN-Indonesia terdapat dalam kutipan berikut.

Sementara itu Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa lahan tinggal sebagai pemicu kericuhan di Pulau Rempang tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU). "Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.

Pada kutipan tersebut Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa lahan yang menjadi penyebab konflik tidak memiliki Hak Guna Usaha dan warga yang menempati pulau rempang tidak memiliki sertifikat. Bentuk representasi ini diburukkan dengan pernyataan yang menyudutkan warga rempang. Pernyataan ini dapat membentuk persepsi khalayak bahwa warga tidak mempunyai bukti hukum yang kuat atas kepemilikan lahan di Rempang meskipun mereka sudah lama mendiami lahan tersebut. Pernyataan menteri ATR/BPN ini sangat mencederai martabat warga Rempang yang telah lama berdomisili di lahan yang disangkalitakan itu. Seharusnya Negara menghargai hak-hak sipil warga Rempang dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak warga Rempang serta

mendapatkan perlakuan yang adil sebagai bagian dari warga Negara Indonesia.

2. Misrepresentasi

Ketidakbenaran penggambaran atau kesalahan penggambaran seseorang, suatu kelompok, atau gagasan adalah bentuk misrepresentasi dalam sebuah wacana berita (Nugroho, 2018). Misrepresentasi dalam wacana teks berita ini ditampilkan pada pernyataan berikut ini.

"Jadi, masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat karena memang dulu, semuanya ada di bawah otorita Batam," ujar Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta.

Pernyataan masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat merupakan bentuk misrepresentasi yang menggambarkan ketidakbenaran terhadap warga Rempang. Melalui pemberitaan ini khalayak dapat menilai bahwa warga Rempang yang telah lama (sejak tahun 1834) mendiami lokasi tersebut merupakan penduduk “liar” atau penduduk ilegal. Pernyataan ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah pada warga Rempang dan mau menggunakan kekuasaan untuk mengambil alih lahan yang akan dibangun PSN Rempang Eko City tersebut. Tentu saja hal ini sangat mencederai martabat warga Rempang yang sudah lama mendiami lokasi tersebut. Pilihan kata pada

frasa “tidak ada sertifikat” seakan-akan menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah pada warga dengan melindungi hak ulayat mereka atas lahan yang disangketakan, tetapi membangun suatu persepsi publik bahwa warga rempang mendiami lokasi yang bukan miliknya secara hukum.

3. Marjinalisasi

Marginalisasi suatu proses penggambaran buruk pada suatu kaum atau kelompok (Silvina Nur Aini, Susi Darihastining, 2023). Bentuk marjinalisasi dalam teks berita dapat berupa eufemisme, disfemisme, labelisasi, dan stereotip. Bentuk marjinalisasi berupa eufemisme dan disfemisme dalam wacana berita berjudul “Polemik Status Tanah Rempang Batam yang Bakal Disulap PSN Eco-City”, ditampilkan sebagai berikut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menyatakan peristiwa di kawasan Pulau Rempang bukan penggusuran. Ia mengatakan yang terjadi adalah pengosongan lahan oleh yang berhak.

Bentuk marjinalisasi berupa eufemisme terdapat dalam kutipan tersebut diatas. Klausula “pengosongan lahan oleh yang berhak” merupakan bentuk penghalusan makna kata “penggusuran”. Penggunaan klausula tersebut mau menunjukkan kepada publik bahwa kebijakan relokasi warga oleh

pemerintah dilakukan karena ada pihak yang lebih berhak atas lokasi tersebut. Relokasi dilakukan sebagai bentuk pengosongan lahan bukan terjadi penggusuran atau pemidahan warga secara paksa. Hal ini merupakan bentuk dominasi pemerintah dalam upaya relokasi warga rempang dari pemukimannya yang akan dibangun kawasan Rempang Eco City.

Bentuk marjinalisasi lainnya berupa disfemisme terdapat dalam pernyataan Menkopolhukan Mahfud MD berikut ini.

"Nah, proses pengosongan tanah inilah yang sekarang menjadi sumber keributan, bukan hak atas tanahnya, bukan hak guna usahanya," lanjutnya.

Pernyataan pengosongan lahan menjadi sumber keributan menempatkan warga pada posisi sebagai penyebab terjadinya konflik lahan di pulau Rempang. Pernyataan ini sangat menyudutkan warga yang sedang berjuang atas hak ulayat atas tanah leluhur mereka. Warga dianggap seolah-olah tidak memiliki hak atas lokasi yang didiami sekarang sehingga yang menjadi persoalan adalah proses pengosongannya.

Selanjutnya Mahfud MD juga mengatakan bahwa,

Mahfud menyebut negara telah memberikan hak atas Pulau Rempang kepada sebuah entitas perusahaan pada 2001-2002 berupa Hak Guna Usaha (HGU) .

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Negara secara sepihak telah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) kepada entitas atau perusahaan tertentu tanpa berkompromi terlebih dahulu dengan warga pulau Rempang. Pada posisi ini warga Rempang merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah karena dengan keputusan sepihak ternyata tanah leluhurnya yang akan dibangun proyek strategis nasional itu telah dikuasai pihak lain sejak tahun 2001-2002. Seolah izin investasi kepada perusahaan bisa mengeliminasi hak ulayat dan hak hidup warga Rempang.

4. Delegitimasi

Praktik delegitimasi dalam berita dengan judul “Polemik Status Tanah Rempang Batam yang Bakal Disulap PSN Eco-City” menekankan bahwa hanya kelompok sendiri (kami) yang benar, sedangkan kelompok lain tidak benar, tidak layak, dan tidak abash (Cinu, 2017). Bentuk delegasi dalam wacana berita tersebut, terdapat dalam pernyataan berikut ini.

Hadi mengatakan, sebelum terjadi konflik di Pulau Rempang, pemerintah telah melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat.

Menteri ATR/BPN ini menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat Rempang mengenai pengembangan PSN kawasan Rempang Eco City. Pernyataan ini menunjukkan bahwa

langkah yang ditempuh pemerintah dalam proses relokasi langkah yang tepat yakni melalui sebuah proses sosialisasi dan pendekatan sebelumnya.

Lebih lanjut Hadi Tjahjanto mengatakan,

Menurutnya, hampir 50 persen dari warganya menerima usulan yang telah disampaikan.

Pernyataan Hadi Tjahjanto ini mempertegas pernyataannya sebelumnya. Pernyataan ini sebagai bukti bahwa sebagian besar warga Rempang telah setuju untuk di relokasi ke lokasi baru. Berdasarkan pendekatan delegitimasi, disini dapat dilihat bagaimana upaya pemerintah untuk membenarkan keputusannya dan bukan sebagai penyebab terjadinya konflik lahan di pulau Rempang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis model Michal Foucoult dengan mengkaji unsur representasi, misrepresentasi, marjinalisasi, dan delegitimasi terhadap berita dengan judul berita 1 “Konflik Lahan di Rempang Meruncing, Pemerintah Diminta Dengar Aspirasi Warga” yang dimuat di media online Kompas.com dan berita ke 2 “Polemik Status Tanah Rempang

Batam yang Bakal Disulap PSN Eco-City” yang dimuat di CNN Indonesia disimpulkan sebagai berikut.

Bentuk representasi dalam berita 1 ditunjukkan melalui pernyataan “identitas dan jati diri bagi orang melayu” sebagai bentuk representasi mau menekankan pada pembaca bahwa warga Rempang adalah warga asli suku melayu yang sudah lama menetap di pulau Rempang, dan warga adalah pemilik kawasan Rempang yang sesungguhnya. Sedangkan pada berita 2 Bentuk representasi diburukan dengan pernyataan yang menyudutkan warga Rempang bahwa warga tidak mempunyai bukti hukum berupa sertifikat yang kuat atas kepemilikan lahan di Rempang.

Misrepresentasi ditampilkan pada berita 1 dengan tuduhan bahwa warga Rempang menetap atau tinggal secara ilegal di pulau Rempang. Warga Rempang yang telah lama mendiami wilayah tersebut dianggap sebagai warga ilegal karena status lahan adalah Hutan Produksi Konversi (HPK). Pada berita 2 Pernyataan *masyarakat yang menempati Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat* merupakan bentuk misrepresentasi yang menggambarkan ketidakbenaran terhadap warga Rempang. Pernyataan ini tentu sangat mencederai martabat warga Rempang yang sudah lama mendiami lokasi tersebut.

Marjinalisasi merupakan penggambaran buruk kepada pihak/kelompok lain tetapi tidak terjadi pemilahan antara pihak kita dengan pihak mereka. Bentuk marjinalisasi pada wacana berita 1 berupa labelisasi dan disfemisme. Labelisasi dilakukan dengan cara menyebut warga Rempang tinggal secara illegal di lahan yang akan dijadikan pengembangan proyek Eco City. Sedangkan disfemisme dengan penggunaan kata “menggusur” pada untuk menggantikan istilah relokasi. Pada berita 2, marjinalisasi berupa eufemisme dan disfemisme. Eufemisme terdapat dalam klausa “pengosongan lahan oleh yang berhak” merupakan bentuk penghalusan makna kata “penggusuran”. Sedangkan disfemisme terdapat pada pernyataan pengosongan lahan menjadi sumber keributan. Hal ini menempatkan warga pada posisi sebagai penyebab terjadinya konflik lahan di pulau Rempang.

Bentuk deletigimasi dalam wacana berita 1 dibuktikan dengan pernyataan menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang merupakan otoritas dari pemerintah meminta warga Rempang untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Negara. Pada berita 2 bentuk delegasi melalui pernyataan Menteri ATR/BPN ini menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan atau sosialisasi kepada masyarakat Rempang mengenai pengembangan PSN kawasan Rempang Eco City. Kedua

pernyataan dalam berita ini menunjukkan bahwa pemerintah atau pemegang kekuasaan selalu berada pada pihak yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, R., Muhammad, S., & Muhammad, R. (2019). Pilkada yang Membelah Media (Relasi Kuasa di Balik Kontestasi Wacana Pilgub Sulsel 2018). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 1(1), 43–55. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/HJS/article/download/6933/3838/18415>
- Cinu, S. (2017). AGAMA, MELITERISASI DAN KONFLIK (Kasus Poso, Sulawesi Tenggara). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.24014/af.v15i1.4007>
- Eriyanto. 2001. Analisis wacana (pengantar analisis teks media). Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara
- Eriyanto. 2005. Analisis wacana (pengantar analisis teks media). Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara
- Fauzan, U. (2014). ANALISIS WACANA KRITIS DARI MODEL FAICLOUGH HINGGA MILLS. *World Health Organization, World Bank Group, OECD*, 6(July), 1–100. <http://elibrary.almaata.ac.id/1714>
- Halwati, U. (2013). Analisis Foucault Dalam Membedah Wacana Teks Dakwah Di Media Massa. *At-Tabasyir, Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Volume 1(1), 145–158. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.p>

hp/komunikasi/article/download/456/450

Universitas Negeri Semarang

- Hamid, I., & Susilowati, A. Y. (2020). Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme dalam Pengelolaan SDA. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1), 155–173.
<https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6384>
- Mulyana. (2005). Kajian Wacana: Teori, Metode, dan Aplikasi Prinsip-prinsip Analisis Wacana. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Muttaqin, A. (2012). *Agama Dalam Representasi Ideologi Media Massa*. 6(2).
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/komunika/article/view/349>
- Nugroho, Y. K. (2018). Analisis Wacana Berita Pemeriksaan Pada Surat Kabar Indopos. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 11(4), 317–328.
<https://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/view/289>
- Rahmawati, I. Y. (2016). Analisis Teks Dan Konteks Pada Kolom Opini Latihan Bersama Al Komodo 2014 Kompas. *Jurnal Dimensi Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(1), 49–57.
<https://doi.org/10.24269/dpp.v4i1.53>
- Rustono dan Mardikantoro, H. (2023). Kajian Wacana Kritis Model Michel Foucault. *Materi* 4, 2, 4. IPB;
- Safitri, M., & Hamid, I. (2023). Kontestasi Paradigma Ekologi Politik Dalam Konflik Agraria. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(02), 106.
<https://doi.org/10.20527/pn.v5i02.8437>
- Sari, S. P. (2014). Analisis Wacana Kritis Pada Berita Kriminal Surat Kabar Posmetro Padang. *Majalah Ilmiah*, 25(2), 124–137.
<http://lppm.upiypk.ac.id/ojs3/index.php/MAJALAHILMIAH/index>
- Silvina Nur Aini, Susi Darihastining, D. M. (2023). MARGINALISASI GENDER DALAM BERITA ONLINE TRIBUNNEWS.COM KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP MAHASISWI (ANALISIS WACANA SARA MILLS). *Prosiding Conference on Research and Community Services*, 510–521.
<https://ejournal.stkipjb.ac.id/index.php/CORCYS/article/view/3293/2393>
- Suryawati, I., & Jamalullail, J. (2021). Analisis Wacana Kritis Keputusan Pembubaran Front Pembela Islam di Kompas.com. *Jurnal Komunikatif*, 10(1), 38–52.
<https://doi.org/10.33508/jk.v10i1.3040>